



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
NOMOR : 58/DJU/SK/HM02.3/02/2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PESERTA RAPAT KOORDINASI SATUAN TUGAS SISTEM  
INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP)  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,**

**Menimbang** : a. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 149/DJU/SK/PS.01/3/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) di Lingkungan Peradilan Umum telah dikeluarkan, maka untuk itu perlu diadakan kegiatan Rapat Koordinasi Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) di Lingkungan Peradilan Umum;  
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada poin a, maka nama-nama dalam keputusan ini dipandang mampu untuk berperan aktif, memberikan masukan-masukan untuk kemajuan SIPP di lingkungan peradilan umum;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;  
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;  
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik;  
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 149/DJU/SK/PS.01/3/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) di Lingkungan Peradilan Umum;  
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
TENTANG PENUNJUKAN PESERTA RAPAT KOORDINASI SATUAN  
TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) DI  
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

- KESATU : Menunjuk mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) di Lingkungan Peradilan Umum.
- KEDUA : 1. Masing-masing Divisi (Kajian dan Troubleshoot) menyampaikan hasil temuan dan masukan untuk Aplikasi SIPP.  
2. Mengkaji bahan audit implementasi Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum.  
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KETIGA : Peserta dibebaskan dari pekerjaan selama mengikuti kegiatan tersebut, mulai tanggal 20 sampai dengan 23 Februari 2018.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas tersebut dibebankan sepenuhnya kepada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Surabaya, Makassar, Mataram, Kupang, Pekanbaru, Banjarmasin, Bengkulu, Medan, Yogyakarta, Ambon;
6. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, Rantau, Bontang, Oelamasi, Madiun, Tabanan, Sekayu, Sumber, Mungkid, Singkawang, Sungguminasa, Lembata, Kab. Kediri, Sengkang, Stabat, Kuala Tungkal;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta;
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT KOORDINASI SATUAN TUGAS  
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP)  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM  
TAHUN 2018

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Heru Pramono, SH, M. Hum	19611119 198512 1 001	Hakim Utama Muda (IV/d)	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin
2	Sirande Palayukan, SH, M. Hum	19560815 198312 1 002	Hakim Utama Muda (IV/d)	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar
3	Saurasi Silalahi, SH, MH	19550224 198512 1 001	Hakim Utama Muda (IV/d)	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
4	Dr. Albertina Ho, SH., MH	19600101 198612 2 001	Hakim Utama Muda (IV/d)	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
5	Saut Marulitua Pasaribu, SH, MH	19661019 199212 1 001	Hakim Madya Utama (IV/c)	Ketua Pengadilan Negeri Kapanen
6	Husnul Khotimah, SH, MH	19741213 199903 2 002	Hakim Madya Pratama (IV/a)	Ketua Pengadilan Negeri Wonosari
7	Anteng Supriyo, SH, MH	19780530 200112 1 003	Hakim Pratama Utama (III/d)	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin
8	Mustamin, SH, MH	19830817 200904 1 010	Hakim Pratama Madya (III/c)	Hakim Pengadilan Negeri Sengkang
9	Rizkiansyah, SH	19840202 200912 1 003	Hakim Pratama Muda (III/b)	Hakim Pengadilan Negeri Sekayu
10	Adrian Anju Purba, SH	19861031 200912 1 001	Hakim Pratama Muda (III/b)	Hakim Pengadilan Negeri Tabanan
11	Adi Wahyono, SH	19611113 198503 1 004	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera Pengadilan Tinggi Kupang
12	Supriyadi Gunawan, S.Sos, MM	19700912 199003 1 001	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informasi Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat, Badan Urusan Administrasi

13	Ahmad Jauhar, ST, MH, MM	19760831 200212 1 008	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana dan Informatika Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat, Badan Urusan Administrasi
14	Roby Hidayat, S.T	19841204 200904 1 005	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI Pengadilan tinggi Pekanbaru
15	Dona Panambayan, SH, MH	19821213 200904 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Rantau
16	Ita Masyita, S.Kom	19870312 201101 2 014	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Bontang
17	Marisa Eka Putra, ST, M. Eng	19840715 200904 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Singkawang
18	Oktein Joshepus Susak, SH	19811023 200604 1 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi
19	Aris Susilo, ST	19821118 200904 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Bagian Kepegawaian dan TI Pengadilan Negeri Madiun
20	Fransisco Palang Ama, ST	19840929 201101 1 011	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Bagian Kepegawaian dan TI Pengadilan Tinggi Ambon
21	Ichwan Setiawan, ST	19870526 201101 1 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Bagian Kepegawaian dan TI Pengadilan Tinggi Mataram
22	Zeno Dani Kuncoro, ST	19850722 201101 1 011	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Bagian Kepegawaian dan TI Pengadilan Tinggi Bengkulu
23	Jhon Hendriansyah, SH	19780602 200805 1 001	Penata Muda (III/a)	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
24	Bambang Andi Saputro, S.Kom	19890816 201503 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Sungguminasa
25	Indira Dewi, SH	-	Honorer	Staf Statistik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
26	Dodon Angin Wiyono, S.Kom	-	Honorer	Staf Statistik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

27	Pito Keraf, S.Kom	-	Honorar	Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Lembata
28	Raja Muda Arif, S.Kom	-	Honorar	Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Stabat
29	Yusrani	-	Honorar	Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Sumber
30	Agustinus Evan Bangun Merdhiko, S.Kom	-	Honorar	Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Mungkid
31	Andik Eko Ferdianto, S.Kom	-	Honorar	Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Kab. Kediri

DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,



HERRI SWANTORO